

	PepsiCo, Inc.	Tanggal Berlaku: 11/01/2012 Direvisi 1 September 2025
	Judul: KEBIJAKAN KEPATUHAN ANTIPENYUAPAN GLOBAL	Halaman 1 dari 7
Departemen / Penulis: Kepatuhan & Etika Global		

KEBIJAKAN KEPATUHAN ANTIPENYUAPAN GLOBAL

IKHTISAR KEBIJAKAN

Kebijakan ini menekankan kewajiban PepsiCo untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam semua transaksi bisnis dengan memberikan kerangka kerja yang jelas yang:

- Melarang penyuapan sektor publik dan komersial
- Menangani proses uji tuntas antikorupsi wajib yang akan dilaksanakan terhadap pihak ketiga
- Menjelaskan aturan yang harus diikuti terkait hadiah, jamuan, perjalanan, dan hiburan yang berkaitan dengan Pejabat Pemerintah
- Menjelaskan persyaratan untuk donasi, pemberian sponsor, dan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility atau CSR) dengan titik kontak pemerintah
- Menekankan pentingnya memelihara pembukuan dan catatan yang akurat untuk semua transaksi PepsiCo

Pertanyaan Umum Kebijakan Kepatuhan Antipenyuapan Global PepsiCo berisi panduan yang lebih terperinci tentang setiap topik inti ini. Pertanyaan Umum tersedia [di sini](#) dan pada laman beranda Kepatuhan & Etika di myPepsiCo.com (laman beranda C&E).

KEBERLAKUAN KEBIJAKAN

Kebijakan ini berlaku untuk semua Rekan Kerja PepsiCo. Untuk tujuan kebijakan ini, Rekan Kerja PepsiCo meliputi:

- Semua karyawan PepsiCo di seluruh dunia (termasuk karyawan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya)
- Anggota Dewan Direksi PepsiCo saat mereka bertindak dalam kapasitasnya sebagai direktur
- Karyawan, pejabat, dan direktur usaha patungan (joint venture atau JV) atau afiliasi yang sebagian besar kepemilikan atau kendali manajemennya dipegang oleh PepsiCo (misalnya, anak perusahaan yang terkonsolidasi). Apabila PepsiCo berpartisipasi dalam JV sebagai pemegang saham nonpengendali untuk penjualan dan distribusi produk makanan atau minuman bermerek PepsiCo (misalnya, Pembotolan), JV tersebut akan diberi tahu tentang kebijakan PepsiCo dan didorong untuk menerapkan standar yang sama pada operasinya

Siapa yang dimaksud dengan Pejabat Pemerintah?

- Semua karyawan pemerintah, termasuk karyawan badan regulasi, departemen, kementerian, dan badan publik lainnya seperti universitas, pegawai negeri sipil seperti petugas dan pegawai bea cukai, serta badan penyelidik
- Setiap kandidat jabatan politis (meskipun tidak pernah menjabat)
- Setiap partai politik atau pejabat partai politik
- Pejabat terpilih di tingkat pemerintahan mana pun, termasuk wali kota, komisaris, dan anggota dewan kota
- Perwakilan organisasi internasional publik, seperti Organisasi Kesehatan Dunia dan Bank Dunia
- Anggota penegak hukum/polisi dan militer
- Karyawan Badan Usaha Milik Negara, seperti perkeretaapian, maskapai penerbangan, rumah sakit, dan laboratorium, SPBU, atau penjara milik pemerintah
- Anggota keluarga kerajaan
- Karyawan badan amal internasional publik
- Pasangan atau anggota keluarga dekat dari salah satu pihak di atas

	PepsiCo, Inc.	Tanggal Berlaku: 11/01/2012 Direvisi 1 September 2025
	Judul: KEBIJAKAN KEPATUHAN ANTIPENYUAPAN GLOBAL	Halaman 2 dari 7
Departemen / Penulis: Kepatuhan & Etika Global		

Ketentuan dalam kebijakan ini juga berlaku, *jika sesuai*, untuk semua pihak ketiga yang terikat dengan Pedoman Perilaku Pemasok PepsiCo. Rekan Kerja PepsiCo yang melibatkan kontraktor nonlini depan untuk menyediakan layanan bertanggung jawab untuk menyampaikan persyaratan kebijakan, sejauh diizinkan oleh hukum setempat.

1.0 SUAP DAN UANG PELICIN

Rekan Kerja PepsiCo dilarang memberikan atau menawarkan Suap atau Uang Pelicin. PepsiCo tidak mengizinkan pembayaran Uang Pelicin dan pembayaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebijakan ini, meskipun diizinkan oleh hukum. Oleh karena itu, semua penyebutan Suap dalam kebijakan ini juga mencakup Uang Pelicin.

Rekan Kerja PepsiCo tidak boleh membayar Suap, kecuali jika penolakan untuk membayar permintaan Suap akan menimbulkan ancaman langsung terhadap kesehatan atau keselamatan mereka. Semua pembayaran Suap yang dilakukan untuk menghindari situasi berbahaya, dan semua permintaan Suap (terlepas dari apakah pembayaran itu benar-benar dilakukan), harus segera dilaporkan kepada petugas Kepatuhan & Etika setempat atau Departemen Hukum setempat. Sebagaimana dibahas dalam **Bagian 5.0** di bawah ini, semua pembayaran harus dicatat secara akurat.

Apa yang dimaksud dengan Suap?

Suap adalah setiap pembayaran atau tawaran untuk membayar **barang berharga** kepada Pejabat Pemerintah atau kepada siapa pun atau entitas di sektor swasta atau komersial dengan tujuan membujuk penerima untuk menyalahgunakan posisinya atau memberikan keuntungan bisnis yang tidak adil

Apa yang dimaksud dengan Barang Berharga?

Barang Berharga dapat berupa uang tunai, setara tunai seperti kartu hadiah yang dapat ditukarkan dengan produk atau uang tunai, kupon, hadiah, keramahtamahan, jamuan, barang, layanan atau barang dagangan, tiket acara, sertifikat ritel, hiburan, fasilitas perjalanan, penggunaan rumah liburan, tiket pesawat, atau akomodasi, bantuan seperti peluang pendidikan, ketenagakerjaan, atau magang untuk teman dan kerabat, opsi saham, donasi untuk badan amal yang ditunjuk, diskon, layanan pribadi, pinjaman, penandatanganan bersama pinjaman, atau janji ketenagakerjaan di masa mendatang

2.0 RISIKO PENYUAPAN YANG BERKAITAN DENGAN PIHAK KETIGA

PepsiCo dapat bertanggung jawab atas tindakan Pihak Ketiga yang menawarkan atau membayarkan Suap kepada Pejabat Pemerintah atas nama PepsiCo. Dilarang memberikan Suap melalui Pihak Ketiga PepsiCo. Mengabaikan tanda peringatan bahwa tindakan Pihak Ketiga mungkin mengakibatkan pemberian atau penawaran Suap juga merupakan pelanggaran terhadap kebijakan ini.

Apa yang dimaksud dengan Uang Pelicin?

Uang Pelicin adalah pembayaran yang dilakukan kepada Pejabat Pemerintah untuk mempercepat tindakan atau layanan nondiskresioner, seperti memberikan perlindungan polisi atau layanan surat, memproses visa, izin, atau mengizinkan permohonan, mengizinkan barang melalui bea cukai, atau menyediakan utilitas seperti layanan telepon, air, dan listrik; **semua ini tidak diizinkan di PepsiCo**

	PepsiCo, Inc.	Tanggal Berlaku: 11/01/2012 Direvisi 1 September 2025
	Judul: KEBIJAKAN KEPATUHAN ANTIPENYUAPAN GLOBAL	Halaman 3 dari 7
Departemen / Penulis: Kepatuhan & Etika Global		

Uji Tuntas Pihak Ketiga (Third Party Due Diligence atau TPDD)

PepsiCo memiliki program uji tuntas antikorupsi berbasis risiko, yang dikenal sebagai Uji Tuntas Pihak Ketiga (TPDD). Detail lebih lanjut tentang TPDD, termasuk penjelasannya dari proses TPDD lima langkah, dapat ditemukan dalam [Ikhtisar Proses TPDD PepsiCo](#), yang tersedia [di sini](#) dan pada laman beranda C&E atau hubungi Kepatuhan & Etika Global untuk mengetahui informasi lebih lanjut.

Catatan: Setiap Rekan Kerja PepsiCo tidak boleh melibatkan Pihak Ketiga hingga semua proses uji tuntas antikorupsi yang diwajibkan telah diselesaikan. Karyawan PepsiCo harus menyediakan dokumentasi pendukung yang menunjukkan keberhasilan penyelesaian TPDD yang berlaku pada saat penyiapan vendor.

Apa yang dimaksud dengan Pihak Ketiga?

Berdasarkan kebijakan ini, Pihak Ketiga adalah siapa pun yang dipekerjakan PepsiCo, seperti pemasok, agen, konsultan, vendor, atau penyedia layanan. Distributor yang membeli produk dari PepsiCo dengan harga yang dinegosiasikan, memperoleh hak milik, dan menjual kembali kepada pengguna akhir sesuai dengan syarat dan ketentuan PepsiCo yang dinegosiasikan juga dianggap sebagai Pihak Ketiga

3.0 HADIAH, JAMUAN, PERJALANAN, DAN HIBURAN UNTUK PEJABAT PEMERINTAH*

**Untuk mengetahui persyaratan terperinci mengenai hadiah bisnis kepada atau dari Pelanggan, Pemasok, dan Pihak Ketiga Lainnya, bacalah [Kebijakan Hadiah Bisnis Global](#).*

Hadiah, jamuan, perjalanan, dan hiburan berpotensi memengaruhi Pejabat Pemerintah secara tidak pantas. Oleh karena itu, Rekan Kerja PepsiCo umumnya tidak dianjurkan untuk memberikan hadiah atau keramahtamahan kepada Pejabat Pemerintah. Namun demikian, dalam keadaan tertentu, hadiah atau keramahtamahan wajar yang melibatkan Pejabat Pemerintah dapat diizinkan, dengan ketentuan bahwa:

- (1) pengeluaran memenuhi serangkaian persyaratan minimum yang ditetapkan di bawah ini; dan
- (2) Rekan Kerja PepsiCo menerima **persetujuan tertulis sebelumnya dari pejabat Kepatuhan & Etika setempat atau Departemen Hukum setempat**

Persyaratan Minimum untuk Pengeluaran yang melibatkan Pejabat Pemerintah¹

Sebelum menawarkan hadiah atau keramahtamahan kepada atau untuk Pejabat Pemerintah, pastikan bahwa setidaknya hal tersebut:

- diberikan dengan iktikad baik, tanpa mengharapkan balas jasa atau manfaat atau keuntungan bisnis yang tidak pantas

¹ Persetujuan terpisah yang berkaitan dengan undang-undang pembiayaan kampanye, etika pemerintah, pelobian, dan pengungkapan, mungkin juga diperlukan karena undang-undang dan peraturan khusus negara dapat memberlakukan pembatasan dan pengecualian yang berbeda dari yang diuraikan dalam kebijakan ini.

	PepsiCo, Inc.	Tanggal Berlaku: 11/01/2012 Direvisi 1 September 2025
	Judul: KEBIJAKAN KEPATUHAN ANTIPENYUAPAN GLOBAL	Halaman 4 dari 7
Departemen / Penulis: Kepatuhan & Etika Global		

- wajar* dan lazim, artinya sesuai dengan standar kesopanan profesional yang diterima secara umum
- diberikan secara terbuka dan transparan
- jarang diberikan tanpa menimbulkan kesan tidak pantas
- diperbolehkan menurut undang-undang dan peraturan setempat

* Saat menentukan pengeluaran yang wajar untuk keramahtamahan, pertimbangkan batasan tarif global yang ditetapkan dalam Bagian III, dan apendiks H4 pada, [Kebijakan Perjalanan & Hiburan Global PepsiCo](#).

<u>Setiap hadiah kepada Pejabat Pemerintah juga harus memenuhi kriteria <i>tambahan</i> berikut:</u>	<u>Keramahtamahan apa pun untuk Pejabat Pemerintah juga harus memenuhi kriteria <i>tambahan</i> berikut:</u>
• harus bernilai nominal (umumnya di bawah \$100,00 USD)	• memiliki tujuan bisnis yang jujur/sah
• diberikan atas nama PepsiCo dan bukan atas nama individu mana pun	• berhubungan langsung dengan atau dikaitkan dengan pelaksanaan aktif bisnis PepsiCo

Prapersetujuan Tertulis

Semua permintaan prapersetujuan hadiah, jamuan, perjalanan, dan hiburan untuk Pejabat Pemerintah harus dikirimkan dengan mengisi formulir online singkat (Formulir Prapersetujuan) yang tersedia [di sini](#) atau pada laman beranda C&E.

Pengecualian dari Persyaratan Prapersetujuan

Sesuai dengan undang-undang dan peraturan setempat yang berlaku, prapersetujuan untuk pengeluaran terkait Pejabat Pemerintah tidak diperlukan hanya dalam situasi tertentu berikut:

- memberikan (atau sehubungan dengan Entitas Pemerintah, mendonasikan, *lihat* Bagian 4.0 di bawah ini) barang promosi atau periklanan dengan logo PepsiCo (seperti bola golf, kaus, atau barang serupa yang berlogo), yang bernilai \$100,00 USD atau kurang per Pejabat Pemerintah (tidak melebihi \$200,00 USD) per Pejabat Pemerintah per tahun, dan sehubungan dengan Entitas Pemerintah, tidak melebihi \$1.000,00 USD per tahun)
- keramahtamahan kecil untuk Pejabat Pemerintah seperti roti lapis, minuman, kudapan, dll., baik di dalam maupun di luar lokasi PepsiCo dan dengan nilai total sebesar \$10,00 USD, selama keramahtamahan diberikan sehubungan dengan pelaksanaan aktif bisnis PepsiCo

Apa yang dimaksud dengan Entitas Pemerintah?

- Setiap pemerintah, badan regulasi, departemen, atau kementerian, seperti badan keselamatan, kesehatan, pajak, perizinan, dan bea cukai, kepolisian atau pemadam kebakaran, serta militer;
- Badan publik atau badan usaha milik negara (BUMN), seperti universitas, laboratorium, stasiun televisi, atau rumah sakit publik;
- Setiap perusahaan komersial yang *dikendalikan* negara meskipun sebagian besar tidak dimiliki negara, seperti saham minoritas di maskapai penerbangan publik atau perusahaan utilitas yang dikelola oleh pemerintah;
- Organisasi publik internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia, Bank Dunia, organisasi buruh internasional, atau badan amal internasional
- Partai politik

	PepsiCo, Inc.	Tanggal Berlaku: 11/01/2012 Direvisi 1 September 2025
	Judul: KEBIJAKAN KEPATUHAN ANTIPENYUAPAN GLOBAL	Halaman 5 dari 7
Departemen / Penulis: Kepatuhan & Etika Global		

Pengecualian ini TIDAK mengizinkan keramahtamahan berulang untuk Pejabat Pemerintah, sekalipun setiap kalinya hanya bernilai sebesar \$10,00 USD atau kurang, dari sumber PepsiCo mana pun.

Dokumentasi Penggantian Biaya

Saat meminta penggantian biaya atas Barang Berharga yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah, Rekan Kerja PepsiCo harus menyebutkan dengan jelas pada laporan penggantian biaya mereka nama, jabatan, dan afiliasi pemerintah dari Pejabat Pemerintah tersebut berikut tujuan pengeluarannya, serta harus mengirimkan tanda terima pengeluaran, tanpa memandang nilainya. Selain itu, prapersetujuan tertulis yang mengizinkan pengeluaran tersebut harus dikirimkan. Karyawan PepsiCo harus memilih kategori pengeluaran “Pejabat Pemerintah” yang sesuai yang tersedia dalam sistem pelaporan pengeluaran setempat (misalnya, Concur).

Setiap manajer PepsiCo tidak boleh menyetujui permintaan penggantian biaya yang dikeluarkan oleh bawahan langsung untuk pengeluaran yang ditanggung atas nama Pejabat Pemerintah tanpa bukti prapersetujuan tertulis. Manajer PepsiCo akan diminta untuk mengonfirmasi prapersetujuan yang sah sebelum mengizinkan penggantian biaya.

4.0 DONASI, PEMBERIAN SPONSOR, ACARA PERUSAHAAN, & AKTIVITAS CSR KEPADA/UNTUK ENTITAS PEMERINTAH ATAU YANG BERKAITAN DENGAN PEJABAT PEMERINTAH

Donasi amal atau pemberian sponsor yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Pemerintah tidak diizinkan. Namun demikian, donasi kepada, atau pemberian sponsor untuk, Entitas Pemerintah atau entitas yang *berkaitan* dengan Pejabat Pemerintah, dapat diberikan dalam keadaan tertentu. Untuk tujuan kebijakan ini, penerima donasi atau sponsor dianggap “berkaitan dengan” Pejabat Pemerintah jika entitas penerima diketahui dimiliki, dikelola, atau dikendalikan secara langsung oleh Pejabat Pemerintah, termasuk jika Pejabat Pemerintah menjabat sebagai dewan.

Semua donasi harus diberikan hanya untuk tujuan amal semata, tanpa bermaksud memengaruhi keputusan bisnis tertentu. Semua pemberian sponsor harus dilakukan untuk menumbuhkan kepentingan bisnis yang sah.

Apa yang dimaksud dengan Donasi?

- Donasi mencakup barang berharga, termasuk donasi uang tunai, produk, atau sumber daya perusahaan (termasuk waktu personel) yang diberikan atas nama PepsiCo untuk membangun muhibah atau mendukung tujuan amal, termasuk dukungan keuangan, produk, waktu dan peralatan personel, atau aset fisik lainnya

Apa yang dimaksud dengan Pemberian Sponsor?

- Pengaturan di mana PepsiCo membayar agar dikaitkan dengan atau untuk mendukung organisasi, proyek, acara, atau program tertentu

Apa yang dimaksud dengan Acara Perusahaan?

- Pertemuan, konferensi, pelatihan, atau pertemuan terkait bisnis lainnya yang digelar atau diselenggarakan oleh PepsiCo di dalam atau di luar fasilitasnya, termasuk karyawan dan/atau pemangku kepentingan eksternalnya

Apa yang dimaksud dengan Aktivitas CSR?

- Investasi komunitas yang melibatkan PepsiCo dalam upaya untuk meningkatkan masyarakat dan lingkungan sekaligus mendukung citra merek yang positif untuk PepsiCo

	PepsiCo, Inc.	Tanggal Berlaku: 11/01/2012 Direvisi 1 September 2025
	Judul: KEBIJAKAN KEPATUHAN ANTIPENYUAPAN GLOBAL	Halaman 6 dari 7
Departemen / Penulis: Kepatuhan & Etika Global		

Karena Acara Perusahaan dapat mencakup Pejabat Pemerintah yang hadir, dan aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR) sering kali melibatkan interaksi dengan pemerintahan kota setempat, setiap Acara Perusahaan atau prakarsa CSR yang melibatkan Entitas Pemerintah atau yang berkaitan dengan Pejabat Pemerintah juga tercakup dalam kebijakan ini. Namun demikian, kebijakan ini tidak membahas donasi amal, pemberian sponsor, Acara Perusahaan, atau aktivitas CSR yang dilakukan oleh PepsiCo kepada Entitas Nonpemerintah atau yang berkaitan dengan Pejabat Nonpemerintah. Dalam hal tersebut, baca **Kebijakan Donasi Global** atau **Kebijakan SpendWise** untuk mengetahui persyaratan terperinci mengenai aktivitas tersebut.

Persyaratan Prapersetujuan

Jika donasi, sponsor, Acara Perusahaan, atau kegiatan CSR akan diberikan kepada Badan Pemerintah atau berhubungan dengan Pejabat Pemerintah dan *belum ditinjau secara hukum*, **persetujuan tertulis sebelumnya dari pejabat Kepatuhan & Etika setempat atau Departemen Hukum setempat** harus diperoleh.² Semua permintaan prapersetujuan harus diajukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Prapersetujuan online sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 3.0 di atas.

Berkonsultasilah dengan pejabat Kepatuhan & Etika setempat atau Departemen Hukum setempat untuk mengetahui persyaratan tambahan yang berlaku terkait donasi amal, pemberian sponsor, Acara Perusahaan, dan aktivitas CSR yang akan disediakan kepada Entitas Pemerintah atau yang berkaitan dengan Pejabat Pemerintah.

5.0 PEMBUKUAN DAN CATATAN YANG AKURAT

PepsiCo diwajibkan untuk membuat dan menyimpan pembukuan dan catatan yang secara adil dan akurat mencerminkan setiap transaksi yang melibatkan bisnis PepsiCo dan yang memberikan informasi yang cukup untuk menyajikan pemahaman lengkap tentang setiap transaksi. Transaksi tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan manajer yang tepat dan harus dicatat secara transparan yang memungkinkan penyusunan laporan keuangan secara akurat. Semua Rekan Kerja PepsiCo harus memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan pembukuan dan pencatatan yang berlaku untuk peran dan tanggung jawab mereka.

² Jika tidak yakin, apakah pengeluaran memerlukan prapersetujuan, mintalah saran dari pejabat C&E setempat atau Departemen Hukum setempat, atau langsung kirimkan untuk mendapatkan prapersetujuan.

	PepsiCo, Inc.	Tanggal Berlaku: 11/01/2012 Direvisi 1 September 2025
	Judul: KEBIJAKAN KEPATUHAN ANTIPENYUAPAN GLOBAL	Halaman 7 dari 7
Departemen / Penulis: Kepatuhan & Etika Global		

6.0 MELAPORKAN DUGAAN PELANGGARAN

Semua Rekan Kerja PepsiCo wajib melaporkan dugaan pelanggaran terhadap kebijakan ini atau hukum antikorupsi yang berlaku kepada pejabat Kepatuhan & Etika setempat atau Departemen Hukum setempat. Sebagai alternatif, dugaan pelanggaran dapat dilaporkan melalui saluran Speak Up PepsiCo. Laporan yang dibuat ke saluran Speak Up dapat dilakukan secara anonim. Kebijakan Larangan Pembalasan Dendam Global PepsiCo melarang pembalasan dendam terhadap setiap individu yang melaporkan dengan iktikad baik hal yang diyakininya sebagai pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Global, kebijakan PepsiCo, atau hukum.

7.0 TINDAKAN DISIPLINER ATAS PELANGGARAN KEBIJAKAN

Setiap Karyawan PepsiCo yang melanggar kebijakan ini dapat dikenakan tindakan disipliner, sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan, termasuk pemutusan hubungan kerja.

8.0 PENGECUALIAN DARI KEBIJAKAN

Setiap pengecualian yang diberikan secara khusus harus disetujui secara tertulis oleh pejabat Kepatuhan & Etika setempat atau Departemen Hukum setempat yang berlaku, dan pengecualian tertentu juga harus disetujui secara tertulis oleh Kepala Pejabat Kepatuhan & Etika Global serta Penasihat Umum Global.